BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Teori Dependensi dan Teori Pembangunan Ekonomi Internasional (Harrod-Domar) dalam menganalisis kerja sama Indonesia-Tiongkok melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI) mengungkapkan dinamika yang kompleks antara risiko ketergantungan dan potensi pertumbuhan ekonomi. Teori Dependensi menegaskan bahwa ketergantungan negara berkembang seperti Indonesia pada investasi asing dari negara maju seperti Tiongkok dapat memperkuat ketimpangan struktural, terutama melalui kontrol sumber daya, dominasi teknologi, dan risiko jebakan utang (Cardoso & Faletto, 1979; Utama, 2021). Dalam konteks BRI, hal ini tercermin dari ketergantungan Indonesia pada pendanaan Tiongkok untuk proyek infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Bitung, yang berpotensi mengurangi otonomi kebijakan ekonomi dan memicu ketidakseimbangan hubungan bilateral akibat asimetri kekuatan ekonomi. Di sisi lain, Teori Harrod-Domar menekankan bahwa investasi asing merupakan instrumen krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan konektivitas (Amaliyah & Muhaimin, 2023). Pembangunan infrastruktur melalui BRI, seperti Pelabuhan Bitung, dapat menciptakan efek *multiplier* dengan meningkatkan efisiensi logistik, memperluas akses perdagangan internasional, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terkait, sehingga berkontribusi pada peningkatan *output* nasional dan penciptaan lapangan kerja.

Meskipun kedua teori ini tampak kontradiktif, keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan dualitas investasi asing. Teori Dependensi mengingatkan akan risiko struktural seperti dominasi ekonomi dan utang yang tidak berkelanjutan, sementara Teori Harrod-Domar menyoroti peluang transformasi ekonomi melalui pembangunan berbasis investasi. Dalam kasus

Indonesia, proyek BRI menunjukkan bahwa investasi asing dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi wilayah, seperti pengembangan kawasan timur Indonesia melalui Pelabuhan Bitung, meskipun disertai tantangan seperti penggunaan tenaga kerja asing dan minimnya transfer teknologi (Amalia et al., 2021). Oleh karena itu, keberhasilan memanfaatkan investasi asing bergantung pada kemampuan negara penerima dalam mengelola risiko ketergantungan melalui kebijakan strategis, seperti diversifikasi sumber pendanaan, penguatan kapasitas industri domestik, dan penegasan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kemandirian jangka panjang.

Keseimbangan antara meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat dapat dicapai melalui pendekatan multidimensi. Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan mekanisme pengawasan utang, memastikan proyek infrastruktur berorientasi pada produktivitas ekonomi, serta memperkuat peran tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan regulasi ketenagakerjaan (Fitriani, 2018). Selain itu, negosiasi yang lebih setara dengan Tiongkok dalam aspek transfer teknologi dan keterlibatan industri dalam negeri menjadi kunci untuk menghindari relasi dependensi yang timpang. Dengan demikian, kerja sama melalui BRI tidak hanya sekadar mencerminkan ketergantungan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi wahana strategis bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, asalkan dikelola dengan prinsip kedaulatan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan nasional.

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan strategi global yang diperkenalkan oleh Tiongkok pada tahun 2013 dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan kerja sama ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Indonesia menjadi salah satu mitra utama dalam inisiatif ini karena letaknya yang strategis di jalur maritim internasional. Kolaborasi ini mencakup berbagai proyek infrastruktur, seperti Pelabuhan Bitung dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional. Meskipun BRI memberikan peluang besar, seperti peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, implementasinya juga

menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya meliputi potensi peningkatan utang, dampak terhadap lingkungan, serta ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. Selain itu, aspek geopolitik perlu diperhitungkan agar Indonesia dapat menjaga keseimbangan hubungan diplomatiknya di tengah persaingan global. Dari perspektif sosial, BRI dapat meningkatkan akses ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait penguasaan lahan oleh investor asing. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengelola kerja sama ini secara strategis dengan memastikan keberlanjutan lingkungan, transparansi proyek, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Utang luar negeri merupakan instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi keterbatasan sumber daya ekonomi domestik. Indonesia telah memanfaatkan utang luar negeri sejak era Orde Baru untuk mendukung industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Hingga tahun 2023, posisi utang luar negeri Indonesia mencapai USD 402 miliar, mencakup utang pemerintah dan sektor swasta. Meskipun utang luar negeri dapat memberikan peluang dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, ketergantungan yang berlebihan terhadap pinjaman luar negeri berpotensi menimbulkan risiko ekonomi, seperti fluktuasi nilai tukar dan beban pembayaran yang berlebihan.

Indonesia memperoleh utang luar negeri dari berbagai negara dan lembaga internasional, dengan Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat sebagai kreditor utama. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama ekonomi dengan Tiongkok semakin meningkat melalui skema Belt and Road Initiative (BRI). Sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Pelabuhan Bitung, telah didanai melalui pinjaman luar negeri dari Tiongkok. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mendukung perdagangan, dan menarik investasi asing. Meskipun proyek ini memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, ada kekhawatiran mengenai

potensi risiko "jebakan utang" yang dapat mengurangi kedaulatan ekonomi Indonesia jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi risiko ketergantungan pada utang luar negeri, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi mitigasi. Salah satu langkah utama adalah diversifikasi sumber pembiayaan, dengan meningkatkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam mata uang rupiah guna mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar. Per Maret 2023, sekitar 71,41% dari total utang pemerintah berasal dari SBN domestik. Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi *liability management*, seperti *buyback* dan *debt switch*, guna menekan biaya utang serta memperpanjang jatuh tempo pembayaran.

Dalam menjaga stabilitas fiskal, pemerintah Indonesia berupaya mempertahankan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 60%. Per Maret 2023, rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 37,68%, menunjukkan pengelolaan utang yang relatif terkendali. Bank Indonesia juga memainkan peran penting dalam mengawasi utang luar negeri sektor swasta, termasuk dengan menerapkan regulasi yang mewajibkan perusahaan non-bank untuk melakukan pelindungan nilai (hedging) terhadap risiko nilai tukar. Selain itu, pemerintah juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang, dengan menyediakan laporan berkala mengenai posisi dan komposisi utang luar negeri. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dengan strategi ini, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pengelolaan risiko utang luar negeri agar tetap dalam batas yang aman dan berkelanjutan.

Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor infrastruktur dan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* atau FDI). Sejak diluncurkan, BRI

telah menjadi platform strategis yang memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia, seperti jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri, yang sebelumnya sering terkendala oleh keterbatasan pendanaan. Melalui kerja sama ini, Indonesia tidak hanya mendapatkan akses terhadap sumber pendanaan yang lebih besar, tetapi juga teknologi dan keahlian dari Tiongkok yang dapat mempercepat pembangunan. Selain itu, BRI telah membuka peluang pasar baru bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan ekspor komoditas dan produk manufaktur ke negara-negara yang terhubung dalam jaringan BRI. Sinergi antara Jalur Sutra Maritim abad ke-21 yang diusung Tiongkok dengan visi Poros Maritim Dunia Indonesia telah menciptakan kerangka kerja yang saling menguntungkan, memperkuat posisi Indonesia sebagai hubungan perdagangan dan logistik di kawasan Asia Pasifik.

Pembangunan infrastruktur yang memadai memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat arus perdagangan, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Sebelum adanya kerja sama BRI, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang relatif stabil, tetapi sering terkendala oleh infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak, pelabuhan yang tidak efisien, dan jaringan logistik yang terbatas. Hal ini menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan masuknya investasi dari Tiongkok melalui BRI, berbagai proyek strategis mulai dikembangkan, salah satunya adalah pengembangan wilayah Bitung di Sulawesi Utara, yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pelabuhan Bitung memiliki peran strategis karena terletak di jalur perdagangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pengembangan Pelabuhan Bitung tidak hanya meningkatkan kapasitas perdagangan Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim global.

Selain itu, BRI juga mendorong peningkatan investasi asing langsung (FDI) dari Tiongkok ke Indonesia, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi. Investasi ini tidak hanya terbatas pada sektor infrastruktur, tetapi juga merambah ke sektor-sektor lain seperti energi, manufaktur, dan pariwisata. Misalnya, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan energi terbarukan telah membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan demikian, kerja sama BRI tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pembangunan fisik, tetapi juga mendorong transformasi struktural dalam perekonomian Indonesia yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dirancang untuk menarik investasi di sektor industri, ekspor, dan perdagangan. Dengan fokus utama pada industri pengolahan perikanan serta kelapa dan turunannya, kawasan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal serta menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan guna mempercepat pertumbuhan KEK, termasuk PP No. 32 Tahun 2014 dan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pelabuhan Bitung juga memiliki keunggulan dibandingkan pelabuhan utama lainnya seperti Tanjung Priok, terutama dari segi jarak dengan pelabuhan internasional utama. Dengan jarak yang lebih pendek ke negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, Pelabuhan Bitung dapat menjadi hub perdagangan yang lebih efisien dan mengurangi biaya logistik ekspor-impor Indonesia.

Ekspor dari Pelabuhan Bitung ke Tiongkok menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, nilai ekspor mencapai $92,86 juta, kemudian meningkat menjadi $99,33 juta pada 2020. Pada tahun 2021, ekspor melonjak drastis hingga $163,96 juta, yang mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Tren ini terus berlanjut pada 2022 dengan ekspor sebesar $187,76 juta, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi $180,05 juta pada 2023. Fluktuasi ini dipengaruhi

oleh berbagai faktor, termasuk permintaan pasar global, kebijakan perdagangan Tiongkok, serta dinamika ekonomi internasional. K erja sama BRI telah memberikan manfaat besar bagi Indonesia, terutama dalam peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi daerah seperti Sulawesi Utara. Namun, tantangan tetap ada, seperti risiko ketergantungan pada investasi asing serta fluktuasi dalam ekspor. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan transparansi, efisiensi pengelolaan investasi, serta diversifikasi sektor ekonomi agar manfaat dari kerja sama ini dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) antara Indonesia dan Tiongkok menjadi bagian strategis dalam upaya pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia memprioritaskan pengembangan infrastruktur sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada pembangunan jalan tol, kereta api, bandara, dan pelabuhan. Langkah ini sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia, yang bertujuan memperkuat sektor kelautan dan perdagangan. Namun, tantangan dalam implementasi proyek BRI masih cukup besar. Terbatasnya anggaran pembangunan infrastruktur, seperti yang disebutkan dalam RPJMN 2015–2019, mendorong Indonesia untuk mencari pendanaan dari luar negeri. Keputusan untuk bergabung dalam koridor BRI pada tahun 2015 didasarkan pada kebutuhan akan investasi dan transfer teknologi guna meningkatkan kapasitas infrastruktur nasional. Meski demikian, ketergantungan terhadap investasi asing juga menghadirkan risiko, terutama terkait utang luar negeri dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, salah satu kendala utama dalam menarik investasi asing adalah tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Menurut laporan Transparency International (2023), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di angka 34 dari skala 100, menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi hambatan signifikan bagi investor. Korupsi menciptakan ketidakpastian

hukum, meningkatkan biaya investasi, serta memperpanjang proses birokrasi yang menghambat realisasi proyek. Akibatnya, investor lebih memilih negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, seperti Singapura dan Malaysia, yang menawarkan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan transparan. Selain itu, efektivitas proyek BRI juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan dan risiko finansial proyek. Dengan lebih dari 1.000 perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Indonesia dan sekitar 32.000 pekerja asal Tiongkok, pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang dikelola memiliki kondisi keuangan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko gagal bayar utang dan potensi monopoli asing dalam proyek strategis nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia perlu menerapkan beberapa langkah mitigasi, antara lain:

1) Memperkuat regulasi anti-korupsi dan transparansi proyek investasi, agar investor memiliki kepastian hukum yang lebih baik.
2) Mengoptimalkan investasi asing secara selektif, dengan memastikan bahwa proyek-proyek BRI memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal, terutama dalam transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja.
3) Meningkatkan kapasitas infrastruktur domestik, agar ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing dapat diminimalkan dalam jangka panjang.
4) Menyeimbangkan utang luar negeri dengan sumber pembiayaan domestik, guna menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari risiko jebakan utang.

Secara keseluruhan, proyek Belt and Road Initiative di Indonesia berpotensi memberikan manfaat besar dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing ekonomi. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kebijakan pengelolaan investasi yang transparan, tata kelola proyek yang baik, serta mitigasi risiko ekonomi dan politik. Jika dikelola dengan efektif, proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dari keempat dokumen yang telah dianalisis, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia guna mengoptimalkan manfaat kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) serta pengelolaan utang luar negeri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional:

1) Diversifikasi Sumber Pembiayaan

   Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dengan memperkuat sumber pembiayaan domestik, seperti penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk proyek infrastruktur.

2) Peningkatan Transparansi dan Tata Kelola Proyek

   Pengelolaan proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui kerja sama BRI harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari risiko korupsi, inefisiensi anggaran, serta potensi jebakan utang yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3) Penguatan Transfer Teknologi dan Kapasitas SDM

   Kerja sama investasi dengan negara lain, khususnya dengan Tiongkok, harus diarahkan untuk mendorong transfer teknologi dan pengembangan tenaga kerja lokal, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi investasi asing tetapi juga mampu meningkatkan daya saing industri nasional.

4) Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Infrastruktur Strategis

   Pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan Pelabuhan Bitung dan KEK lainnya selaras dengan kebijakan perdagangan nasional, sehingga dapat meningkatkan ekspor, memperkuat daya saing industri lokal, serta menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI).

5) Manajemen Risiko Utang dan Stabilitas Ekonomi

Untuk menghindari tekanan fiskal akibat tingginya beban utang luar negeri, pemerintah harus menerapkan strategi liability management yang mencakup buyback utang, debt switch, serta menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam batas aman.

6) Peningkatan Efektivitas Implementasi Proyek Infrastruktur

Pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek strategis dalam BRI berjalan sesuai dengan rencana melalui evaluasi berkala, pengawasan ketat, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan menerapkan strategi ini, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari investasi asing, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang tanpa terjebak dalam risiko ketergantungan pada utang luar negeri.